

PENGARUH BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH ADAT MAMTA

Charley M. Bisai¹
charleybisai@feb.uncen.ac.id
Riski Romadhan²
Yundy Hafizrianda³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan belanja modal maupun pertumbuhan ekonomi serta menguji apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Adat Mamta tahun 2013-2016. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Deskriptif Kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui situs www.djpk.depkeu.go.id, dan Badan Pusat Statistika melalui situs www.bps.go.id/provinsipapua. Sampel dalam penelitian ini adalah Wilayah Adat Mamta terdiri dari 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Memberamo Raya dan Kota Jayapura dengan empat tahun pengamatan yaitu tahun 2013-2016. Metode analisis regresi data panel digunakan untuk mengukur pengaruh dari gabungan kedua data yang digunakan yaitu data time series dan cross section. Analisis data menggunakan bantuan program Eviews 9.0. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data panel dengan variabel independen yaitu belanja modal sedangkan variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Adat Mamta. Secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada masing-masing Kabupaten/Kota tersebut.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Wilayah Adat Mamta

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, Pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan Pembangunan dan hasil- hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur Pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Walaupun indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya (Nordian dan Hertianti, 2010). Menurut Yani (2009) belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan,

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

² Alumni Magister Ilmu Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

Pemberlakuan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 2001, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Otonomi daerah mempunyai tujuan dalam rangka mencapai kemandirian daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa daerah lebih mengerti kondisi daerahnya sehingga pembangunan daerah akan dapat difokuskan pada prioritas kebutuhan dan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Pemekaran setelah Undang-Undang Otonomi Khusus) yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 21 November 2001 oleh pemerintah pusat ditandai dengan penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001. Otonomi khusus (Otsus) yang diberikan merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas tersebut menunjukkan pula tanggung jawab yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan potensi kekayaan alam, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Kewenangan yang diberikan kepada orang-orang asli Papua, memberikan jaminan yang memadai untuk berperan serta merumuskan kebijakan pembangunan, menentukan strategi pembangunan, serta memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat.

Penetapan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai daerah otonomi khusus adalah merupakan salah satu kebijakan strategis yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan publik, mendorong adanya akselerasi pembangunan, dan sebagai instrumen pemberdayaan seluruh masyarakat Papua, terutama penduduk orang asli Papua. Adapun tujuan utama dari pelaksanaan otonomi khusus ini adalah dapat mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan provinsi lainnya di Indonesia, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pertumbuhan ekonomi yang sangat berbeda jauh dengan daerah lain di Indonesia, selain itu juga memberikan kesempatan yang relevan bagi orang asli Papua sebagai subjek pembangunan, dimana selama ini selalu menjadi objek pembangunan. Kesenjangan ini yang menjadi pemicu utama meledaknya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia tahun 2013, penduduk miskin di Indonesia sebesar 28.594.600 orang atau 11,66 persen dari total penduduk Indonesia, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan jumlah persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia.

Pembangunan Papua selama ini dirasakan masih belum mampu memberikan rasa keadilan secara keruangan. Pembangunan selama ini masih berorientasi pada kawasan-kawasan yang memiliki aksesibilitas mudah seperti pada kawasan-kawasan pesisir di Pulau Papua. Selain itu pendekatan pembangunan yang bersifat fisik dirasakan juga kurang mampu menjawab kebutuhan pembangunan Papua secara utuh. Berkaca dari keadaan tersebut maka paradigma pembangunan di Pulau Papua mulai dilakukan perubahan ke arah pembangunan yang mengedepankan pendekatan budaya/adat sebagai konsep dasar tema pembangunan di Papua.

Pemerintah melakukan satu upaya percepatan pembangunan di Papua dengan mengedepankan pendekatan wilayah adat. Pembangunan berbasis wilayah adat sebenarnya merupakan satu amanah dalam PP No.26 Tahun 2008 Tentang RTRWN yang menetapkan Papua sebagai pusat pertumbuhan berbasis wilayah adat. Papua memiliki 7 wilayah adat yaitu wilayah adat Domberay dan Bomberay di Provinsi Papua Barat; serta wilayah adat Me Pago, Saereri, Mamta, La Pago dan Ha Anim di Provinsi Papua.

Wilayah Adat Domberai terletak di Papua Barat Laut sekitar Sorong Manokwari, meliputi: 1. Kabupaten Manokwari, 2. Kabupaten Bintuni, 3. Kabupaten Teluk Wondama, 4. Kabupaten Sorong, 5. Kota Sorong 6. Kabupaten Raja Ampat, 6. Kabupaten Sorong Selatan, dan 7. Kabupaten Tambrauw.

Wilayah Adat Bomberai terletak di Papua Barat yakni meliputi: 1. Kabupaten Fakfak, dan 2. Kabupaten Kaimana.

Wilayah Adat Me Pago merupakan wilayah adat terletak di pegunungan Papua Tengah yakni meliputi: 1. Kabupaten Intan Jaya, 2. Kabupaten Paniai, 3. Kabupaten Deiyai, 4. Kabupaten Nabire, 5. Kabupaten Mimika, dan 6. Kabupaten Dogiyai.

Wilayah Adat Saereri terletak disekitaran teluk cenderawasih yakni meliputi: 1. Kabupaten Biak Numfor, 2. Kabupaten Supiori, 3. Kabupaten Kep. Yapen, dan 4. Kabupaten Waropen.

Wilayah Adat Mamta terletak disekitaran Jayapura yakni meliputi: 1. Kabupaten Jayapura, 2. Kota Jayapura, 3. Kabupaten Sarmi, 4. Kabupaten Keerom, dan 5. Kabupaten Memberamo Raya.

Wilayah Adat La Pago merupakan wilayah adat terkecil terletak di Pegunungan Papua Tengah bagian timur yakni meliputi: 1. Kabupaten Jayawijaya, 2. Kabupaten Lani Jaya, 3. Kabupaten Pegunungan Bintang, 4. Kabupaten Yahukimo, 5. Kabupaten Yalimo, 6. Kabupaten Memberamo Tengah, 7. Kabupaten Puncak, 8. Kabupaten Puncak Jaya, dan 8. Kabupaten Tolikara.

Wilayah Adat Ha Anim terletak di Papua Selatan sekitaran Merauke yakni meliputi: 1. Kabupaten Merauke, 2. Kabupaten Boven Digoel, 3. Kabupaten Mappi, dan 4. Kabupaten Asmat.

Belanja modal pemerintah di Wilayah Adat Mamta pada tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan yang cukup positif tetapi di Wilayah Kabupaten Keerom tahun 2014 mengalami penurunan belanja modal sebesar Rp.745.532.293.120 Miliar rupiah di bandingkan pada tahun sebelumnya yaitu di tahun 2013 sebesar Rp.803.753.164.800 Miliar rupiah.

Berdasarkan tabel diatas semua Kabupaten/Kota menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang membaik dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Wilayah Mamta, terutama di Kabupaten Memberamo Raya dengan nilai PDRB terendah namun setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup positif.

Dari jumlah belanja modal di Wilayah Mamta, maka analisis pertumbuhan ekonomi regional memberikan gambaran membaiknya perekonomian di Wilayah Mamta. Hal ini di cerminkan dari Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Mamta yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 di seluruh Wilayah Adat Mamta.

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perkembangan belanja modal pemerintah di Wilayah Adat Mamta selama kurun waktu 2013-2016?”, ”Berapa besar pengaruh belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Adat Mamta selama kurun waktu 2013-2016?”. Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu (1). Untuk mengetahui perkembangan belanja modal pemerintah di Wilayah Adat Mamta selama kurun waktu 2013-2016, (2). Untuk mengetahui berapa besar pengaruh belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Adat Mamta selama kurun waktu 2013-2016.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Wilayah Adat Mamta, terdiri dari 5 Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Memberamo Raya dan Kota Jayapura. Provinsi Papua. Data penelitian diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) , Belanja modal di Wilayah Adat Mamta 2013-2016, dan data-data lain seperti Panjang Jalan, Panjang Jembatan, Pelabuhan Laut & Bandara serta Banyaknya Pelanggan Listrik di Wilayah Adat Mamta 2013-2016 (Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Memberamo Raya, dan Kota Jayapura).

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, dari Website djpk.kemenkeu.go.id (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), dan Media Internet dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdapat pada laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua dan Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan dengan rentan waktu mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta di download dari internet melalui www.bps.go.id dan www.djpk.menkeu.go.id.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data panel. Analisis data panel merupakan kombinasi dari deret waktu (time-series data) dan kerat lintang (cross-section). Menurut Baltagi (2005), keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah:

1. Data panel membuat data lebih informatif, lebih bervariasi dan mengurangi kolinearitas antar variabel sehingga lebih efisien.
2. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan dengan studi berulang dari cross-section.
3. Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks.
4. Data panel lebih mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat diukur oleh data time-series dan data cross-section.
5. Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam setiap individu.

Regresi data panel dapat dimodelkan sebagai berikut:

$$\ln y_t^k = \ln \alpha + \beta_1 \ln X_{1t}^k + \varepsilon_t^k$$

Dimana:

\ln = Logaritma Natural

α = Konstanta

β = Vektor berukuran $P \times 1$ merupakan parameter hasil estimasi

X_{it} = Observasi ke- i dari P variabel bebas

ε_{it} = error regresi seperti halnya pada model regresi klasik.

Dalam regresi data panel terdapat empat model yang dapat digunakan. Model tersebut antara lain: model OLS pooled, model fixed effects least square dummy variabel (LSDV), model fixed effects within-group dan model random effect (Gujarati: 2013). Pemilihan model yang akan dipakai, diseleksi dengan uji spesifikasi model. Terdapat dua uji spesifikasi yaitu efek tetap (fixed effects) atau efek random (random effect).

1. Uji Spesifikasi Model
2. Uji Spesifikasi Model dengan Uji Chow

Uji spesifikasi bertujuan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan. Uji Chow digunakan untuk memilih antara model fixed effect atau model common effect yang sebaiknya dipakai.

H_0 : Common Effect

H_a : Fixed Effect

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas Chi-square lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah common effect. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah fixed effect. Ketika model yang terpilih adalah fixed effect maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausmann untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai fixed effect model (FEM) atau random effect model (REM).

3. Uji Signifikansi

1) Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila nilai prob $F <$ taraf sig 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2) Uji Parsial (t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat probabilitas t hitung, ketika prob $<$ taraf signifikansi 5%, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel bebas tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat.

3) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau goodness of fit digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai dari R^2 berada pada rentang 0-1. Semakin tinggi angka tersebut maka semakin baik model yang dibuat dan sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ekonometrika: Pemilihan Metode Analisis Data

Setelah melakukan perhitungan regresi data panel dengan menggunakan pendekatan Fixed Effect, dan pendekatan Random Effect masing-masing sebagai berikut:

Metode *Fixed Effect*:

Dependent Variable: @LOG(PDRB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/09/18 Time: 16:03

Sample: 2013 2016

Included observations: 4

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.078490	2.845225	-2.487849	0.0321
JYP_-- @LOG(BMJYP_)	0.764756	0.165217	4.628811	0.0009
SRM_-- @LOG(BMSRM_)	0.607289	0.169214	3.588885	0.0049
KRM_-- @LOG(BMKRM_)	0.856270	0.338521	2.529447	0.0299
MBR_-- @LOG(BMMBR_)	0.988110	0.223091	4.429171	0.0013
KJP_-- @LOG(BMKJP_)	0.798240	0.213758	3.734315	0.0039

Fixed Effects (Cross)

JYP_--C	1.939683
SRM_--C	4.677235
KRM_--C	-1.939269
MBR_--C	-6.481747
KJP_--C	1.804098

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.997808	Mean dependent var	15.10401
Adjusted R-squared	0.995836	S.D. dependent var	1.204527
S.E. of regression	0.077726	Akaike info criterion	-1.964393
Sum squared resid	0.060414	Schwarz criterion	-1.466527
Log likelihood	29.64393	Hannan-Quinn criter.	-1.867204

F-statistic	505.8886	Durbin-Watson stat	2.492529
Prob(F-statistic)	0.000000		

Metode Random Effect:

Dependent Variable: @LOG(PDRB?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 06/04/18 Time: 23:04

Sample: 2013 2016

Included observations: 4

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 20

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.192949	2.364374	-2.619276	0.0174
@LOG(BM?)	0.770884	0.083591	9.222053	0.0000
Random Effects (Cross)				
JYP_--C	0.883691			
SRM_--C	-0.720904			
KRM_--C	-0.479664			
MBR_--C	-1.359514			
KJP_--C	1.676391			

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	1.133365	0.9960
Idiosyncratic random	0.071852	0.0040

Weighted Statistics

R-squared	0.818776	Mean dependent var	0.478533
Adjusted R-squared	0.808708	S.D. dependent var	0.167999
S.E. of regression	0.073477	Sum squared resid	0.097181
F-statistic	81.32474	Durbin-Watson stat	1.394262
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.097499	Mean dependent var	15.10401
Sum squared resid	24.87908	Durbin-Watson stat	0.005446

Setelah dilakukan uji Chow untuk menentukan metode *common effect* atau *fixed effect* yang tepat dengan membandingkan *Sumsquared resid* kedua metode tersebut diperoleh hasil bahwa *Fixed Effect* yang lebih tepat. Selanjutnya dengan uji hausman untuk menentukan apakah metode *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat dalam analisis penelitian ini didapat bahwa metode *Fixed Effect* tetap yang paling tepat dipakai.

Koefisien Determinasi (R^2)

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.997378	Mean dependent var	15.10401
Adjusted R-squared	0.996442	S.D. dependent var	1.204527
S.E. of regression	0.071852	Akaike info criterion	-2.185097
Sum squared resid	0.072278	Schwarz criterion	-1.886377
Log likelihood	27.85097	Hannan-Quinn criter.	-2.126784
F-statistic	1065.126	Durbin-Watson stat	1.869597
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel diatas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi untuk model regresi antara BM (Belanja Modal) terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar

0.996442. Nilai ini berarti bahwa sebesar 99,6442% pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh BM (Belanja Modal). Sedangkan 0.3558% pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel 5, Belanja Modal (BM) dengan t-statistic sebesar 9.198321 dengan tingkat signifikan sebesar 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa dengan nilai signifikan ($0.0000 < 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal (BM) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Hasil Analisis Fixed Effect

Dependent Variable: @LOG(PDRB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/09/18 Time: 16:03

Sample: 2013 2016

Included observations: 4

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.078490	2.845225	-2.487849	0.0321
JYP_-- @LOG(BMJYP_)	0.764756	0.165217	4.628811	0.0009
SRM_-- @LOG(BMSRM_)	0.607289	0.169214	3.588885	0.0049
KRM_-- @LOG(BMKRM_)	0.856270	0.338521	2.529447	0.0299
MBR_-- @LOG(BMMBR_)	0.988110	0.223091	4.429171	0.0013
KJP_-- @LOG(BMKJP_)	0.798240	0.213758	3.734315	0.0039
Fixed Effects (Cross)				
JYP_--C	0.884662			
SRM_--C	-0.721700			
KRM_--C	-0.480460			

MBR_--C	-1.360836
KJP_--C	1.678334

Dari hasil regresi data panel model fixed effect, maka dapat dipaparkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel diatas, maka persamaan model regresi linier berganda dengan model data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\ln y_t^k = \ln \alpha + \beta_1 \ln X_{1t}^k + \varepsilon_t^k$$

$$\text{Maka} = -6.141082 + 0.769006\text{BM} + \varepsilon_t^k$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda model data panel yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Belanja Modal Kabupaten Jayapura (BMJYP)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena P-Value = 0.0009 < 0,05 dan Jika Koefisien regresi sebesar 0.764756 menunjukkan bahwa apabila di Kabupaten Jayapura variabel Belanja Modal naik 1%, maka PDRB akan meningkat sebesar 0.764756%.

2. Variabel Belanja Modal Kabupaten Sarmi (BMSRM)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena P-Value = 0.0049 < 0,05 dan Jika Koefisien regresi sebesar 0.607289 menunjukkan bahwa apabila di Kabupaten Sarmi variabel Belanja Modal naik 1%, maka PDRB akan meningkat sebesar 0.607289%.

3. Variabel Belanja Modal Kabupaten Keerom (BMKRM)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena P-Value = 0.0299 < 0,05 dan Jika Koefisien regresi sebesar 0.856270 menunjukkan bahwa apabila di Kabupaten Keerom variabel Belanja Modal naik 1%, maka PDRB akan meningkat sebesar 0.856270%.

4. Variabel Belanja Modal Kabupaten Memberamo Raya (BMMBR)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena P-Value = 0.0013 < 0,05 dan Jika Koefisien regresi sebesar 0.988110 menunjukkan bahwa apabila di Kabupaten Memberamo Raya variabel Belanja Modal naik 1%, maka PDRB akan meningkat sebesar 0.988110%.

5. Variabel Belanja Modal Kota Jayapura (BMKJP)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena P-Value = 0.0039 < 0,05 dan Jika Koefisien regresi sebesar 0.798240 menunjukkan bahwa apabila di Kota Jayapura variabel Belanja Modal naik 1%, maka PDRB akan meningkat sebesar 0.798240%.

Koefisien Fixed Effect (Cross)

Hasil estimasi fixed effect (Cross) diatas menunjukkan terjadi pengaruh yang berbeda-beda pada setiap Kabupaten/Kota yang terdapat di Wilayah Mamta terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Berdasarkan hasil regresi, terdapat 2 Kabupaten/Kota yang memiliki pengaruh *Cross* yang bernilai positif yaitu Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, serta 3 Kabupaten yang memiliki pengaruh negatif yaitu Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Memberamo Raya.

Wilayah yang memiliki efek bernilai positif masing-masing memiliki nilai koefisien sebesar Kabupaten Jayapura 0.884662 dan Kota Jayapura 1.678334, dan sedangkan wilayah yang memiliki nilai koefisien negatif adalah Kabupaten Sarmi -0.721700, Kabupaten Keerom -0.480460, dan Kabupaten Memberamo Raya -1.360836.

Kota Jayapura merupakan wilayah dengan efek paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) yaitu sebesar 1.678334 dan yang paling kecil memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah Kabupaten Memberamo Raya dengan nilai koefisien sebesar -1.360836.

Pembahasan

Dalam penelitian ini Belanja Modal mempunyai nilai 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kenaikan pemberian Belanja Modal dari pemerintah kepada Wilayah Mamta akan menaikkan pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa secara simultan variabel Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai P-Value lebih kecil dari 0,05. Diketahui bahwa nilai F-hitung 1065.126 dan nilai Probabilitas F sebesar 0.0000 dengan taraf 5%. Jadi dapat disimpulkan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini juga didukung oleh nilai $R^2 = 0.996442$. Nilai ini berarti bahwa sebesar 99,6442% pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh BM (Belanja Modal). Sedangkan 0.3558% pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel lain.

Berdasarkan hasil regresi model fixed effect Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi disemua kabupaten/kota di Wilayah Mamta terutama di Kota Jayapura yang paling besar pengaruhnya serta dengan pengaruh terkecil terdapat di Kabupaten Memberamo Raya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Adat Mamta pada tahun 2013-2016, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian belanja modal di wilayah adat mamta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya pada periode tahun 2013-2016.

Belanja modal pemerintah di Wilayah Adat Mamta pada tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan yang cukup positif, tetapi di Wilayah Kabupaten Keerom tahun 2014 mengalami penurunan belanja modal sebesar Rp.745.532.293.120 Miliar rupiah di bandingkan pada tahun sebelumnya yaitu di tahun 2013 sebesar Rp.803.753.164.800 Miliar rupiah dan Belanja Modal tertinggi di Wilayah Adat Mamta yaitu Kota Jayapura pada tahun 2016 sebesar Rp. 1,438,965,039,104 triliun rupiah.

- 2) Secara simultan dan parsial variable belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada di Wilayah adat Mamta pada periode tahun 2013-2016.

a. Uji Simultan

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Adapun penjelasan mengenai hasil uji F yang terdapat pada tabel diatas dengan nilai F-hitung/F-statistic sebesar 1065.126 dan probabilitas F sebesar 0.000000. Dalam taraf signifikansi 5% maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel BM (Belanja Modal) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

b. Uji Parsial

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan, Belanja Modal (BM) dengan t-statistic sebesar 9.198321 dengan tingkat signifikan 5%, dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa dengan

nilai signifikan ($0.0000 < 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal (BM) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Saran

Berdasarkan pada manfaat dan kesimpulan diatas maka disarankan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah di Wilayah Mamta yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kota Jayapura diharapkan untuk terus dapat meningkatkan belanja modal agar pertumbuhan ekonomi tetap signifikan berdasarkan hasil penelitian dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lainnya, seperti dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah, karena variable tersebut juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Serta memperpanjang periode tahun penelitian supaya dapat memberikan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2018). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2013-2016;
- Deddy D. P. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). Belanja Modal Kabupaten/Kota di Wilayah Adat Mamta 2013-2016;
- Freudi, Leondra; Uma, Hasan; Marlissa.Elsyan R. (2018). Analisis Kemampuan Fiskal Guna Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume V No. 1, April 2018;
- Guntur. (2013). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Mediasi. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang;
- Jhingan, M. L. (2000). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. D. Guritno [penerjemah]. Raja Grafindo Persada, Jakarta.;
- Landau, D. (1983). Government Expenditure and Economic Growth: A Cross Country Evidence. Southern Economic Journal, Volume 49 (7): 83-97;
- Norista, G. P. (2010). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang;
- Nurudeen, A. dan Usman A. (2010). Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970 – 2008: A Disaggregate Analysis. Business and Economics Journal, Volume 2010 (BEJ-4): 1-11;
- Pongsikabe, Rully; Hafizrianda, Yundy; Siahainenia, Jody, E. H; Marey, Dominggus. (2018). Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mamberamo Tengah. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume V No. 2, Agustus 2018. Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 44/KEP-MPDT/2010 Tentang Daftar Kabupaten Tertinggal dan Daerah Terentaskan;
- Priyaka Rangga A, Urip Transna P; Indahyani, Rachmaeny. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Fiskal Di Provinsi Papua Tahun 2010-2016. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume V No. 2, Agustus 2018;
- Provinsi Papua Dalam Angka 2013-2017;
- Rahayu, S. A. T. (2004). Peranan Sektor Publik Lokal dan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta Tahun 1987-2000. Jurnal Kinerja. Volume 8 (2): 133-147;

- Rahmawati. (2016). Peranan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Buton Utara. Skripsi. Universitas Haluoleo, Kendari;
- Setiono, D. N. S. (2011). Ekonomi Pengembangan Wilayah: Teori dan Analisis. LP FE-UI, Jakarta;
- Sodik, J. (2007). Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 12 (1): 27-36. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta;
- Todaro, M. P dan Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Haris Munandar [penerjemah]. Erlangga, Jakarta;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.